

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP
PEMBANGUNAN DESA
(Studi Kasus Di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai
Timur)**

Emilianus Jaa

Email : emilianodeljaa331@gmail.com

Sulistyo

Supami Wahyu Sulistyowati

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Kanjuruhan
Malang*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaruh yang signifikan secara simultan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa. (2) pengaruh yang signifikan secara parsial transparansi pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa. (3) pengaruh yang signifikan secara parsial akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa., (4) pengaruh yang signifikan secara parsial partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dengan teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh terhadap Pembangunan Desa. Pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sudah diterapkan. Dengan pelaksanaan ketiga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat memberikan pengaruh terhadap pembangunan desa dengan menunjukkan tingkat pembangunan desa gurun turi yang sudah mulai meningkat.

Kata Kunci: *Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pembangunan Desa*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and analyze (1) the simultaneous significant influence of transparency, accountability and community participation in managing village fund allocation to village development. (2) partially significant influence of transparency in the management of village fund allocation on village development. (3) partially significant influence of accountability in the management of village fund allocations on village development, (4) partially significant influence of community participation in managing village fund allocations on village

development. This study uses a quantitative approach. This research was conducted in the village of Gurung Turi, East Manggarai Regency. Data collection techniques in this study used a questionnaire with sampling techniques using simple random sampling. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis techniques. The results showed that overall the variables of transparency, accountability and community participation in the Village Fund Allocation Management had an influence on Village Development. The principles of transparency, accountability and community participation have been implemented. With the implementation of the three principles of transparency, accountability, and community participation it has an influence on village development by showing the level of development of the desert village that has begun to increase.

Keynotes: *Transparency, Accountability, Community Participation, Village Fund Allocation On Village Development*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan suatu program yang selalu menjadi prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 dengan jelas menerangkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Desa dalam upaya pembangunan tentu tidak terlepas dari unsur-unsur maupun lapisan masyarakat yang mendiaminya. Baik itu dari pemerintah dan juga masyarakat yang ada dalam suatu desa. Desa sebagai bagian dari pemerintahan langkah awalnya adalah dengan memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangannya sendiri melalui pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, (UU No 6 tahun 2014 pasal 71 ayat 4). Tujuan dari ADD itu sendiri adalah untuk membiayai kegiatan operasional desa dan program pembangunan desa.

Pada kenyataannya ketiga prinsip ini seringkali diabaikan dimana keberadaan ketiga prinsip ini tidak berjalan bersamaan dalam penerapannya. Pemerintah kadang hanya menjalankan prinsip akuntabilitas sebagaimana bentuk tanggung jawabnya sebagai pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pihak yang memberikan kewenangan. Kadang juga, pemerintah hanya menjalankan keduanya yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk jawaban pemerintah akan tuntutan perkembangan informasi yang semakin pesat sehingga terpaksa untuk menjalankan keduanya dengan tuntutan bahwa pemerintah itu harus transparan dan akuntabel. Namun partisipasi masyarakat dalam pemerintahan tidak diperhatikan. Pengelolaan ADD sekiranya menganut prinsip dan asas pengelolaan keuangan desa yaitu harus menganut prinsip akuntabel, transparan, dan partisipatif, (Wiratna, 2015 :27). Sehingga dalam upaya pembangunan desa juga ketiga prinsip ini memberikan pengaruh yang membawa pada perubahan pembangunan desa itu sendiri.

Berdasarkan ketiga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk membahas tentang ketiga prinsip ini dalam penelitian yang akan berlokasi di salah satu desa di Kabupaten Manggarai Timur yaitudi desa Gurun Turi. Ketika ketiga prinsip ini dilaksanakan kiranya akan menciptakan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola Alokasi

Dana Desa. Berdasarkan masalah ini, maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam judul **Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa di Desa Gurun Turi Kabupaten Manggarai Timur**. Adapun rumusan masalah yang akan mempermudah dalam pembahasan hasil penelitian ini ialah bagaimanakah pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan ADD terhadap Pembangunan Desa di desa Gurun Turi Kab. Manggarai Timur? Tujuan Penelitian ini dilaksanakan untuk mendeskripsikan pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan desa di Desa Gurun Turi Kabupaten Manggarai Timur.

KAJIAN TEORI

Konsep pembangunan desa diterangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menerangkan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Sojogyo dan Sagojo sebagaimana yang dikutip oleh Satria yang menyatakan bahwa pembangunan desa harus dilakukan secara menyeluruh terpadu dan terkoordinasi. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat pokok-pokok rumusan dalam pembangunan desa yaitu; pertama, prinsip-prinsip pembangunan desa meliputi : a) imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat, b) dinamis dan berkelanjutan, dan, c) menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan. Kedua, Pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan Desa antara lain : a) Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan potensi alam, b) Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat, c) Peningkatan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat, dan, d) Peningkatan kehidupan ekonomi yang kooperatif. Ketiga, Sasaran Pembangunan Desa, dan keempat, Obyek dan Subyek Pembangunan

Tercapainya suatu pembangunan, tentu tidak terlepas dari bantuan dan dana yang membiayai program pembangunan itu sendiri. Salah satunya adalah Alokasi Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Hal yang samapun juga diterangkan dalam Undang Undang No 6 tahun 2014 pada pasal 71 ayat 4 bahwa ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam upaya mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa telah dengan jelas memberikan pedoman yang menjadi acuan pemerintah desa dalam mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan desa tentunya mempunyai asas atau dasar yang mengikatnya sehingga bisa berjalan sesuai dengan dasar itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wiratna asas pengelolaan keuangan desa yaitu, transparan, akuntabel dan partisipatif, (2015: 27).

Pada prinsipnya pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif (keikutsertaan masyarakat). Lalu seperti apakah transparansi, akuntabilitas dan partisipatif masyarakat itu? Pertama, transparansi. Menurut Tanjung (Handayani, 2015:18), menurut beliau transparansi adalah keterbukaan

dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, sebagaimana yang dikutip oleh Hajar (2017:11) tentang pendapat Krina, mengenai prinsip transparansi, beliau menekankan pada dua aspek mengenai dimensi transparansi, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Lebih lanjut juga beliau menjelaskan indikator tercapainya transparansi, diantaranya : Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan membayar uang suap, kemudahan akses Informasi dan meningkatkan arus Informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Kedua, akuntabilitas. Menurut Arifiyadi (Handayani, 2015 :18) dalam Konsep Tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia, Akuntabilitas dapat diartikan kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Ada beberapa tahapan untuk menjamin akuntabilitas terlaksana, sebagaimana yang dikutip oleh Safratunisa (2015) dalam bukunya Sutedi yang berjudul Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otomomi Daerah, yaitu: pertama, pada tahap proses pembuatan keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah ; pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan, pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip prinsip administrasi yang benar maupun nilai nilai yang berlaku distakeholders, adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sudah sesuai dengan visi, misi organisasi serta standar yang berlaku, adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi, dan konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut. Kedua, pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator unruk menjamin akuntabilitas adalah ; penyebaran informasi mengenai suatu keputusan, melalui media masa, media nirmasa, maupun media komunikasi personal, akurasi dan kelengkapan infomasi yang berhubungan denagn cara cara mencapai sasaran suatu program. akses publik pada informasi atau suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat, dan ketersediaan sistem infomasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai pemerintah.

Ketiga, Partisipasi masyarakat. Menurut Isbandi (Setya, 2012 :14) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upayamengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam prosesmengevaluasi perubahan yang terjadi. Lalu, seperti apakah partisipasi masyarakat itu? Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini lebih dijelaskan seperti apakah bentuk keterlibatan dan dalam hal apa saja keterlibatan masyarakat. Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan. Hal ini disampaikan oleh Hamijoyo (2007) sebagaimana yang dikutip oleh Sacafirmasyah yang diambil dalam situs internet, Hamijoyo mengkalisifikasikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat seperti, partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, dan partisipasi sosial.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik simple random sampling. Dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memeperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, (Sugiyono, 2016: 82). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Gurung Turi yang berusia di atas 21 tahun, untuk sampel menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh responden sejumlah 95 orang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket untuk mengukur pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan ADD terhadap pembangunan desa di desa Gurung Turi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *software SPSS 16.00 for windows*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.515	2.259		3.215	.002
	Transparansi	.443	.181	.247	3.445	.000
	Akuntabilitas	.390	.110	.234	2.916	.017
	Partisipasi Masyarakat	.311	.123	.227	2.252	.038

a. Dependent Variable: Pembangunan Desa

Sumber : data hasil olahan melalui SPSS 16.0 for Windows

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui nilai $a = 4.515$, $b_1 = 443$, $b_2 = 390$, dan $b_3 = 311$, maka dapat disusun persamaan regresi linear beganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 4.515 + 443X_1 + 390X_2 + 311X_3 + e$$

Apabila dianalisis lebih lanjut, maka persamaan regresi tersebut menggambarkan bahwa :

- a. Konstanta sebesar 4.515 memiliki arti bahwa jika variabel X_1 , X_2 , dan X_3 bernilai nol, maka nilai variabel Y akan sebesar 4.515
- b. Beta variabel X_1 (Transaparansi pengelolaan ADD) sebesar 0,443 menunjukkan bahwa jika X_1 ditingkatkan 1 maka akan mengurangi nilai Y sebesar 0,443
- c. Beta variabel X_2 (Akuntabilitas pengelolaan ADD) sebesar 0,390 menunjukkan bahwa jika X_2 ditingkatkan 1 maka akan mengurangi nilai Y sebesar 0,390
- d. Beta variabel X_3 (Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD) sebesar 0,311 menunjukkan bahwa jika X_3 ditingkatkan 1 maka akan mengurangi nilai Y sebesar 0,311

Hasil tes ANOVA Uji F (pengujian secara simultan)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3541.258	3	1232.238	5.765	.000 ^a
	Residual	7228.660	91	67.226		
	Total	10769.918	94			

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Transparansi , Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil uji F dalam menguji pengaruh secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas, transparansi (X1), akuntabilitas (X2), dan partisipasi masyarakat (X3) dalam pengelolaan ADD terhadap variabel terikat, pembangunan desa (X3). Hal ini diperkuat dengan hasil uji F yang menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} (5.765) > F_{tabel} dan nilai Sig, (0,000) lebih kecil dari 0,05. Artinya dalam pengujian hipotesisnya H_{a1} diterima dan H_{o1} ditolak. Maka dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD terhadap pembangunan desa.

Hasil Uji t (pengujian secara parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.515	2.259		3.215	.002
	Transparansi	.443	.181	.247	3.445	.000
	Akuntabilitas	.390	.110	.234	2.916	.017
	Partisipasi Masyarakat	.311	.123	.227	2.252	.038

a. Dependent Variable: Pembangunan Desa

Sumber : data hasil olahan melalui SPSS 16.0 for Windows

Berdasarkan hasil uji t untuk menguji pengaruh secara parsial dapat diketahui dari hasil penelitian yaitu; pertama, pengaruh transparansi pengelolaan ADD terhadap pembangunan desa menunjukkan nilai t_{hitung} (3.445) > t_{tabel} (1.989). Artinya bahwa hipotesis untuk H_{a2} diterima dan H_{o2} ditolak. Maka dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan variabel X1 (transparansi pengelolaan ADD) terhadap variabel Y (pembangunan desa). Kedua, pengaruh akuntabilitas pengelolaan ADD terhadap pembangunan desa. menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (2.916) > t_{tabel} (1,989). Artinya H_{a3} diterima dan H_{o3} ditolak. Maka dapat dikatakan ada pengaruh yang signifikan secara parsial akuntabilitas dalam pengelolaan ADD terhadap pembangunan desa di desa Gurun Turi. Dan, ketiga, pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD terhadap pembangunan desa. menunjukkan bahwa variabel X3 (partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD) nilai t_{hitung} 2.252 > t_{tabel} (1.989). Artinya bahwa untuk H_{o4} ditolak dan H_{a4} diterima, sehingga dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD terhadap pembangunan desa.

**Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.863 ^a	.745	.703	8.84454	.432	11.559	3	91	.000	1.715

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Transparansi , Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Pembangunan Desa

Sumber : data hasil olahan melalui SPSS 16.0 for Windows

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,863, nilai tersebut mengidentifikasi kuatnya pengaruh antara variabel transparansi pengelolaan ADD (X_1), akuntabilitas pengelolaan ADD (X_2), dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD (X_3) terhadap variabel pembangunan desa (Y). Nilai koefisien determinasi (*R Square*) menunjukkan besarnya kontribusi seluruh variabel bebas yaitu transparansi pengelolaan ADD (X_1), akuntabilitas pengelolaan ADD (X_2), dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD (X_3) secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel literasi ekonomi (Y). Nilai *R Square* sebesar 0,745 memiliki makna bahwa variabel transparansi pengelolaan ADD (X_1), akuntabilitas pengelolaan ADD (X_2), dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD (X_3) mampu memberikan kontribusi sebesar 74,5% terhadap pembangunan desa (Y). Dengan demikian, sisanya sebesar 25,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti. Desa Gurun Turi merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Manggarai Timur. Dalam menunjang pembangunan desa tentu tidak terlepas dari dana dan bantuan yang membiayai pembangunan dan juga pengelolaan keuangan yang baik yang tentunya berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa,

sebesar 86,3% merupakan kuatnya pengaruh ketiga prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, dan mampu memberikan kontribusi sebesar 74,5% terhadap pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa, keberadaan ketiga prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat memang sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa. Terwujudnya suatu pembangunan yang tentunya tidak terlepas dari peran dan pelaksanaan ketiga prinsip tersebut.

Pemerintah desa Gurun Turi sudah mulai menerapkan dan menjalankan ketiga prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, lebih khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal ini didukung dengan tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan ketiga prinsip tersebut. Sebanyak 59% pelaksanaan prinsip transparansi di desa Gurun Turi sudah dijalankan. Hal ini ditunjukkan dengan tanggapan masyarakat desa dalam menanggapi empat (4) indikator tercapainya transparansi sebagaimana yang disampaikan oleh Krina (Hajar, 2017:11), diantaranya, penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan membayar uang suap, kemudahan akses informasi, dan meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Begitupun juga dengan pelaksanaan akuntabilitas, sebesar 64,53% sudah dijalankan. Ada dua indikator tercapainya akuntabilitas sebagaimana yang disampaikan oleh Sutedi, (Safratunisa, 2015) diantaranya; pertama, pada tahap proses pembuatan keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah ; pembuatan sebuah

keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan, pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku distakeholders, adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sudah sesuai dengan visi, misi organisasi serta standar yang berlaku, adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi, dan konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut. Kedua, pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah; penyebaran informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmasa, maupun media komunikasi personal, akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program. akses publik pada informasi atau suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat, dan ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai pemerintah.

Sebanyak 66,92% masyarakat sudah turut berpartisipasi kegiatan desa. Hal ini ditunjukkan dengan tanggapan masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam desa sebagaimana yang diungkapkan Hamijoyo (Safirmasyah, 2017), ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan. Hamijoyo mengklasifikasikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat seperti, partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, dan partisipasi sosial.

Ketiga prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung dalam menunjang pembangunan di desa gurun turi. Sebagaimana yang diketahui bahwa pembangunan di Desa Gurun Turi sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi dan tingkat pembangunan di desa serta didukung juga dengan tanggapan masyarakat dalam menilai pembangunan desa, sebesar 59,53% pembangunan desa sudah berjalan dengan baik. Penilaian ini didasari dengan apa yang disampaikan oleh Sojogyo dan Sagojo, (Satria, 2010), bahwa terdapat beberapa pokok-pokok rumusan dalam pembangunan desa yaitu; pertama, prinsip-prinsip pembangunan desa meliputi : a) imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat, b) dinamis dan berkelanjutan, dan, c) menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan. Kedua, Pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan Desa antara lain : a) Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan potensi alam, b) Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat, c) Peningkatan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat, dan, d) Peningkatan kehidupan ekonomi yang kooperatif. Ketiga, Sasaran Pembangunan Desa, dan keempat, Obyek dan Subyek Pembangunan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat di Desa Gurun Turi memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa. Sebesar 86,3% merupakan kuatnya pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat mampu memberikan kontribusi sebesar 74,5% terhadap pembangunan desa. Secara keseluruhan dan secara parsial variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD memiliki atau terdapat pengaruh terhadap pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan ketiga prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat memang sangat berpengaruh terhadap pembangunan di desa.

Pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sangat membantu dalam menunjang pembangunan di desa Gurun Turi. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi pembangunan desa serta keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa, merupakan wujud pelaksanaan prinsip transparansi dan juga partisipasi masyarakat serta melaporkan dan mempertanggungjawaban hasil pengelolaan keuangan desa dengan mewujudkan program pembangunan sesuai dengan yang telah direncanakan dan disepakati bersama. Dengan ini tidak terjadi ketidaksesuaian antara laporan dan hasil yang telah dicapai.

Pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dapat menyatuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa Gurung Turi dalam menjalankan pemerintahannya. Oleh karena itu, pemerintah sangat diharapkan untuk tetap memperhatikan dan menjaga prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sehingga apa yang menjadi program serta rencana dalam upaya pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan desa dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya pemerintah, masyarakat desa Gurung Turi juga diharapkan keterlibatannya dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang partisipatif. Dengan ambil bagian dalam proses perencanaan pembangunan desa. Sebab terwujudnya suatu pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini adalah bagian dari studi lapangan untuk mengetahui dan membandingkan teori teori yang ada dan bagaimana dengan wujud nyata dari teori tersebut. Dengan hasil penelitian ini dapat mengugah dan menarik perhatian peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan yang lebih luas baik secara teoritis maupun secara praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, 2015. *"Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Partai Politik"*. Online (<http://repository.unpas.ac.id>), diakses 12 Desember 2017
- Putri, S. Retno, 2012. *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Mutu Sekolah di SD Kanisius Kadirojo Kalasan*. Jurnal Pendidikan, 3 (3): 43-47
- Satria, Ase. 2010. *Ciri Ciri Dan Prinsip Pembangunan Desa Menurut Para Ahli*, (online), (<http://www.materibelajar.id/2015/12/inilah-ciri-ciri-prinsip-pembangunan-28.html>), di akses 20 Mei 2018
- Shafratunisa, 2015. *"Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penegelolaan Keuangan kepada stakeholders di SD Islam Binakheir"* Jurnal Manajemen Pendidikan, 14 (3) : 101-118
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDesa, Pasal 18.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4)